

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah daerah menganut sistem otonomi daerah yang telah ditetapkan oleh MPR NO XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan Indonesia (Mardiasmo, 2009).

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan oleh undang – undang yang diharapkan memberi dampak kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara yang telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004. Maka akibatnya pemerintah pada daerah dapat meningkatkan kinerja agar memberi pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Lahirnya otonomi yaitu pergeseran pada sistem pemerintahan yaitu sistem desentralisasi. Menurut (Mardiasmo, 2002) dalam otonomi daerah terdapat efektivitas, efisiensi untuk pengelolaan sumber daya pada daerah, supaya dapat meningkatkan kualitas untuk pelayanan umum, kesejahteraan untuk masyarakat dan menciptakan ruang untuk masyarakat supaya berpartisipasi pada perubahan sistem pengelolaan keuangan pemerintah di daerah.

Penyelenggaraan otonomi di daerah dilakukan karena ketidak merataan pembangunan yang berjalan menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Campur tangan pemerintah pusat juga menjadi alasan terhambatnya kreatifitas dalam pemerintah daerah untuk mengelola potensi daerah.

Pemberian otonomi serta desentralisasi untuk kota atau kabupaten dapat memberi keuntungan bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan pembaruan sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah pemerintah dituntut untuk dapat pengelolaan keuangan pada daerah yang berorientasi pada publik menurut (Mardiasmo, 2002). Hal ini dapat memberikan tuntutan untuk memberikan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah yang optimal.

Kinerja adalah hasil atau pencapaian seseorang dalam mengelola atau melaksanakan tugas sesuai fungsi dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari beberapa indikator. Penyampaian dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dapat tepat waktu dan kualitas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan faktor utama. Opini BPK yang baik dapat menjadi indikator utama untuk terwujudnya kinerja pengelolaan keuangan yang baik (Utomo, 2012).

Akuntansi berbasis akrual merupakan *international best practice* dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip *new public Management* (NPM) yang mendepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Kemenkes, 2014). Menurut PP 71 Tahun 2010 basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa

lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau tidak. Manfaat dari akuntansi berbasis akrual adalah pengambilan keputusan yang efektif karena telah mendapatkan informasi yang lebih komprehensif, audit yang efektif karena akuntansi akrual menyediakan catatan yang jelas dan koheren, meningkatkan pengendalian melalui pemahaman yang lebih baik atas dampak informasi keuangan terhadap kebijakan, dan meminimalisasikan resiko kesalahan dalam pembayaran. Laporan keuangan berbasis akrual : LRA, laporan perubahan saldo anggaran, saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, LAK, laporan ekuitas, dan caLK.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan, negara telah membuat aparaturnya yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip – prinsip pemerintah yang baik dan benar sesuai lingkungan pemerintah (PP No 66 Tahun 2008). Jika dilaksanakan dengan benar dan baik, SPIP akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pemimpin hingga pegawai instansi pemerintah, akan melaksanakan tugas dengan jujur dan taat peraturan, akibatnya tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Ini dapat dibuktikan dengan laporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI, kabupaten Demak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2016. Ini adalah pertama kalinya Kabupaten Demak menerima opini WTP dari BPK RI Perwakilan

Jawa Tengah, setelah beberapa tahun sebelumnya opini yang diperoleh adalah Wajar Dengan Pengecualian(WDP). Hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Demak. Fenomena inilah yang menunjukkan hasil yang baik terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Kecurangan dalam pengelolaan keuangan dapat diminimalisasikan dengan penerapan kinerja pengelolaan keuangan yang baik. Dalam Peraturan Undang – Undang di bidang Keuangan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara menitik beratkan adanya asas pengelolaan Keuangan Negara menggunakan asas akuntabilitas berorientasi hasil akuntabilitas kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ada beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah yaitu pemahaman sistem akuntansi, kualitas laporan keuangan, kompetensi, penatausahaan, penganggaran.

Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah menggunakan standar analisis belanja (SAB) merupakan salah satu komponen yang dikembangkan sebagai pengukuran kinerja keuangan dalam menyusun APBN/APBD dengan pendekatan kinerja. SAB adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk

menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah pemahaman sistem akuntansi. Sistem akuntansi berfungsi terhadap prosedur atau aturan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelola keuangan harus memahami sistem akuntansi, oleh sebab itu sistem akuntansi merupakan faktor penting untuk diperhatikan. Penelitian yang dilakukan oleh Erna, dkk (2013) mengatakan bahwa pada penelitian dengan variabel pemahaman sistem akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik yaitu dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari opini auditor. Penelitian yang dilakukan oleh Diana, dkk(2017) menyatakan bahwa dengan kualitas pelapor berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan variabel moderasi teknologi informatika.

Selanjutnya faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah kompetensi. Supaya dapat menghasilkan laporan keuangan pada pemerintah daerah yang berkualitas, pegawai harus yang berkompentensi terhadap bidangnya. Kompetensi adalah kemauan atau keterampilan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatannya. Dengan adanya kompetensi membuat efisien waktu pembuatan

laporan keuangan, karena dalam hal ini pengelola keuangan telah mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan. Sehingga laporan keuangan yang telah disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Tari,dkk(2015) menyatakan bahwa kompetensi pengelola keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian Safwan, dkk(2014) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Faktor yang lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah penatausahaan. Penatausahaan merupakan pencatatan atas segenap tindakan pengurusan administrasi dan pengurusan kebendaharawan yang mengakibatkan bertambahnya dan berkurangnya kekayaan daerah yang termasuk dalam kegiatan – kegiatan pelaksanaan APBD untuk satu tahun anggaran menurut Kusmadi (2009), perubahan mendasar dalam penatausahaan adalah perubahan sistem akuntansi dari kas menjadi berbasis akrual. Penelitian yang dilakukan oleh Erna, dkk (2013) menunjukkan bahwa variabel Pemahaman penatausahaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pengelola keuangan daerah.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah Penganggaran . Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang sangat ditentukan oleh proses perencanaan. Semakin baik proses perencanaan maka akan memberi dampak semakin baik pula terhadap implementasi lapangan. Karena itu,tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang

telah disusun (Rahayu, et al., 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Diana, dkk(2017) menyatakan bahwa penganggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan variabel moderasi teknologi informatika.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan hasil yang bertentangan oleh karena itu penelitian ini layak di teliti kembali. Dengan Riset gap: Penatausahaan, Penganggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Erna, dkk(2013) menyatakan bahwa penatausahaan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah sedangkan Diana, dkk(2017) menyatakan bahwa penatausahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Diana, dkk(2017) menyatakan bahwa penganggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, dkk(2014) menyatakan bahwa Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Hasil-hasil penelitian yang tidak konsisten dan layak untuk dilakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Demak.

Penelitian ini menggabungkan hasil penelitian dari Erna (2013) dan Diana, dkk (2017). Penelitian ini menambahkan variabel baru yaitu kualitas laporan keuangan, kompetensi dan Objek penelitian dilakukan pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, beberapa faktor yang mendasari kinerja pengelolaan keuangan daerah, maka rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman sistem akuntansi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah?
2. Bagaimana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah?
4. Bagaimana pengaruh penatausahaan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah?
5. Bagaimana pengaruh penganggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang pengaruh pemahaman sistem akuntansi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah
2. Untuk menganalisis tentang pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah

3. Untuk menganalisis tentang pengaruh kompetensi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah
4. Untuk menganalisis tentang pengaruh penatausahaan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah
5. Untuk menganalisis tentang pengaruh penganggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis berharap penelitian ini berguna untuk penulis dan pembaca.

Adapun manfaat penelitian diharapkan oleh penulis sebagai berikut :

1.4.1 Aspek Teoritis

1) Bagi Ilmu Ekonomi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh sistem akuntansi, kualitas laporan keuangan, kompetensi, penatausahaan, penganggaran terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah

2) Bagi Akuntansi Keuangan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah

1.4.2 Aspek Praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah

Dapat dijadikan referensi terkait dengan upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang mampu memberikan respon positif terhadap pegawai pada OPD.

2) Bagi Investor

Dapat dijadikan pertimbangan bagi investor dalam memutuskan investasi sebagai salah satu sumber informasi.